



Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Seluruh OPD Kabupaten Pamekasan

Dafiq Fikri Attamimi¹, Yona Octiani Lestari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Dafiqfikri150@gmail.com¹, yona@akuntansi.uin-malang.ac.id²

ARTICLE INFO

Article history:
Received 16 Juni 2022
Received in Revised 04
Mei 2023
Accepted 16 Mei 2023

Keyword's : *budget
planning, budget
execution,
accountability*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of performance-based budgeting on performance accountability in all OPD Pamekasan Regencies. The implementation of this performance-based budget uses four variables, namely, budget planning (X_1), budget execution (X_2), budget accountability (X_3), and performance evaluation (X_4). The study used primary data from a questionnaire distributed to several employees concerned as many as 139 respondents from all OPD as 38 OPD in Pamekasan Regency. This research uses multiple linear regression analysis methods. The results showed that budget execution and performance evaluation had an effect on performance accountability, while budget planning and budget accountability had no significant effect on performance accountability. The conclusion from the results of this study is that budget implementation and performance evaluation have a positive effect, while budget planning and budget accountability have a negative effect on the performance accountability of government agencies.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Penerapan anggaran berbasis kinerja ini menggunakan empat variabel yaitu, perencanaan anggaran (X_1), pelaksanaan anggaran (X_2), pertanggung jawaban anggaran (X_3), evaluasi kinerja (X_4). Penelitian menggunakan data primer kuesioner yang disebarikan kepada beberapa pegawai yang bersangkutan sebanyak 139 responden dari seluruh OPD sebanyak 38 OPD di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan perencanaan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Kesimpulan dari hasil penelitian ini pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh positif sedangkan perencanaan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran berpengaruh negative terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: Dafiqfikri150@gmail.com

Peer review under responsibility of Akuisisi : Accounting Journal. [2477-2984](https://doi.org/10.2477-2984).

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu penentuan yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi (Mardiasmo, 2021) Anggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh pengawasan khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Anggaran sektor publik merupakan alat akuntabilitas untuk mengelola dana publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Anggaran adalah masalah arus informasi dan distribusi yang menjadi perhatian publik, karena anggaran dibuat untuk merencanakan dan menyempurnakan pendanaan untuk semua aktivitas organisasi sektor publik. Anggaran merupakan suatu hal yang sangat relevan dan penting dalam pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) yang berorientasi pada keluaran organisasi dan erat kaitannya dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output.

Pendekatan anggaran kinerja dirancang untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam penganggaran tradisional, terutama kurangnya tolok ukur untuk mengukur kinerja terhadap tujuan dan sasaran layanan publik. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Penyusunan anggaran berbasis kinerja daya dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja maka, diharapkan anggaran tersebut dapat dipergunakan secara maksimal untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 sudah baik berhasil mendapatkan penghargaan akuntabilitas kinerja dengan predikat B dari kementerian pendayagunaan aparatur Indonesia Tjahjo Kumolo, komponen dalam penilaian dalam prestasi akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja, namun pada tahun 2021 akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pamekasan meningkat menjadi BB melihat dari indeks kepuasan masyarakat yang sangat tinggi orientasi kualitas pelayanan merupakan pemenuhan masyarakat harapan Kabupaten Pamekasan kualitas pelayanan menjadi fokus utama dalam upaya untuk mencari pengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan

nilai 81.41 berada dalam interval baik indeks tersebut berdasarkan keputusan menteri aparatur negara nomor KEP/25/M.PAN/2004 (Musoffan et al., 2019) Fenomena yang terjadi di instansi pemerintah Kabupaten Pamekasan, apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran tersebut dan apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome. Berdasarkan paparan di atas, peneliti melihat bahwa anggaran berbasis kinerja yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja masih belum maksimal, sehingga perlu dilakukan pengkajian terkait anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui empat tahap siklus anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Seluruh OPD Kabupaten Pamekasan”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan, kita bisa melihat bahwa, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada seluruh OPD Kabupaten Pamekasan? Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada seluruh OPD Kabupaten Pamekasan? Apakah pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada seluruh OPD Kabupaten Pamekasan? Apakah evaluasi kinerja anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada seluruh OPD Kabupaten Pamekasan ?

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran merupakan rencana keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan diharapkan dapat membiayai dalam periode tertentu (Indra, 2006, p. 164). Anggaran publik berisikan tentang rancangan sebuah kegiatan yang disampaikan dalam wujud rancangan pemerolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran public merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan belanja dan aktivitas (Mardiasmo, 2021, p. 76).

Perencanaan Anggaran

Dalam tahapan pertama perencanaan anggaran setiap bidang menyusun suatu rencana kerja (Renja) merupakan tahapan awal dalam perencanaan anggaran. Renja yang akan dikoreksi oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk mengetahui efektivitas anggaran yang digunakan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan di capai nantinya. Setelah dikoreksi renja tersebut dan disetujui selanjutnya Menyusun PPAS (Platfon Perencanaan Anggaran Sementara) dalam PPAS dapat terjadi adanya perubahan anggaran bisa semakin banyak ataupun bisa juga semakin rendah

tergantung TAPD. Setelah disetujui maka OPD bisa menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) sesuai dengan kegiatan dan sub kegiatan dari setiap bidang yang mana akan lebih rinci dalam menyusun anggaran sesuai dengan estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran adalah proses bagaimana melaksanakan atau merealisasikan apa yang sudah direncanakan dalam dokumen perencanaan anggaran. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan anggaran oleh kepala OPD dilaksanakan setelah dokumen pelaksanaan anggaran OPD dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-OPD) ditetapkan oleh pejabat penatausahaan keuangan daerah (PPKD) dengan persetujuan sekretaris daerah. Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya daripada umpan balik dari pengalaman yang sebelumnya

Pertanggung Jawaban Anggaran

- a. Pengguna anggaran menyampaikan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja perangkat daerah beserta prognosis untuk 6 bulan berikutnya.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh pejabat penatausahaan keuangan untuk ditetapkan sebagai laporan semester pertama anggaran pendapatan dan belanja perangkat daerah.
- c. Pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati melalui PPKD paling lama 10 hari kerja setelah pertama tahun anggaran berakhir.
- d. OPD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja perangkat daerah paling lama minggu kedua bulan juli tahun anggaran yang berkenaan dan disampaikan kepada koordinator pengelolaan daerah
- e. Laporan semester pertama dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya disampaikan kepada bupati paling lama minggu ketiga bulan juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan semester pertama dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya.

- f. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD paling lama bulan juli tahun anggaran berkenaan.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar instansi pemerintah mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau penyebab dari tidak tercapainya suatu kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah dirancang sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisas, dalam mengelolala sumberdaya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik sumberdaya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian dengan menggunakan angka yang diperoleh dari jawaban yang diberikan ke responden kemudian menggunakan teknik perhitungan statistik (Candra et al., 2021). Analisis yang dipakai dalam penelitian menggunakan teknik regresi linier berganda, yaitu teknik yang dapat digunakan menganalisis lebih dari dua variabel bebas. (Hardani et al., 2020,) Data yang digunakan adalah data primer, yang berupa persepsi para responden terhadap variabelvariabel yang digunakan. Komunikasi untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner. Kuisisioner yang diberikan berisi sejumlah pernyataan yang akan dibagikan kepada seluruh pegawai instansi pemerintah. Setiap kuisisioner yang didistribusikan kepada para responden disertai surat permohonan pengisian kuisisioner. Sasaran populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkup pemerintahan Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari satu inspektorat, enam badan, delapan belas dinas, tiga belas kecamatan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi(Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling bertujuan dilakukan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang menjadi anggota sampel adalah kepala

dinas, kepala badan, camat, sekretaris dinas, sekretaris badan, sekretaris kecamatan, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi untuk kecamatan yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban anggaran, evaluasi kinerja. a. Kepala dinas atau kepala badan sebagai pengguna anggaran dengan eselon II b b. Sekretaris dinas, sekretaris badan dan camat sebagai kuasa pengguna anggaran dengan eselon III a c. Sekretaris kecamatan dan kepala bidang sebagai pejabat pembuat komitmen dengan eselon III b d. Kepala sub bagian dan kepala seksi dengan eselon IV b Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Berkas kuesioner akan diberikan langsung kepada seluruh pegawai yang bersangkutan seluruh OPD Kabupaten Pamekasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dekskriptif

Analisis deksriptif dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran kondisi variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban anggaran, evaluasi kinerja dan akuntabilitas kinerja. Dari hasil kuesioner yang terkumpul kemudian diolah menggunakan program SPSS Kondisi variabel yang ditunjukkan oleh tabel 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Analisis Dekskriptif

	N	minimum	maximum	mean	Std. deviation
PrA	139	40.00	50.00	4,574	4,483
PIA	139	36.00	50.00	4,486	5,312
PlpA	139	40.00	50.00	4,696	4,461
EK	139	40.00	50.00	4,545	4,992
AKIP	139	36.67	50.00	4,528	5,255
Valid N (listwise)	139				

Berdasarkan Tabel 1, (1) mean (rata-rata) Perencanaan Anggaran adalah 4.574, yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran sebagai sampel baik, nilai minimum yang diperoleh adalah 40,00, dan nilai maksimum adalah 50,00; (2) rata-rata nilai Pelaksanaan Anggaran (Rata-rata) sebesar 4,486 yang menunjukkan pelaksanaan anggaran yang baik sebagai sampel, sehingga menghasilkan nilai minimal 36,00 dan nilai maksimal 50,00; (3) Rata-rata (rata-rata) untuk pelaporan /pertanggungjawaban anggaran sebesar 4.696, nilai Menunjukkan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran sebagai sampel dinilai baik, memperoleh minimal 40,00 dan maksimal 50,00; (4) Nilai kinerja rata-rata (rata-rata) adalah 4,545. Nilai ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja sampel dinilai baik, dengan skor minimal 40,00 dan skor maksimal 50,00 tercapai. (5) Rata-rata akuntabilitas kinerja pemerintah (rata-rata) adalah 4.528. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja sampel dinilai baik dan skor minimal yang diperoleh adalah 36,67 dan skor maksimal adalah 50,00.

Uji Validitas

Hasil uji validitas terhadap variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja bisa disebut dapat valid, jika, degree of freedom (df) = N-2 menjadi $139-2 = 137$ melalui tingkat yang signifikan $\alpha=5\%$, jadi bisa kita simpulkan bahwa, rtabel yang ada pada penelitian ini yaitu, 0,159. Dari hasil tersebut memperlihatkan bahwa nilai rhitung > rtabel yakni rhitung > 0,159.

Uji Realibilitas

Uji realibilitas biasanya berfungsi untuk melihat seberapa diandalkannya sebuah alat pengukur untuk menghasilkan sebuah jawaban yang konstan. Para penguji akan melakukan uji realibilitas dengan bantuan aplikasi SPSS jika nilai dari *Cronbach Alpha* > 0,70 maka dapat dilihat bahwa, setiap unit pernyataan akan membentuk sebuah variabel penelitian yang mana, nantinya dapat dikatakan reliable. Dari hasil uji reliabilitas yang sudah dilakukan, maka akan mendapatkan hasil seperti dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha	Hasil Uji
Perencanaan Anggaran	0,758	0,70	Reliabel
Pelaksanaan Anggaran	0,811	0,70	Reliabel
Pertanggung Jawaban Anggaran	0,709	0,70	Reliabel
Evaluasi Kinerja	0,797	0,70	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,769	0,70	Reliabel

Pada tabel diatas, kita bisa mengetahui bahwa uji reliabilitas yang dilakukan pada semua variabel memperlihatkan nilai *Cronbach Alpha* yang mana nilainya lebih besar dari 0,70. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa, data tersebut bisa dikatakan reliabel atau pengukurang pada data bisa diandalkan. Maka, pada penelitian ini syarat reliabilitas sudah terpenuhi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan variabel residual atau pengganggu di dalam sebuah model regresi menyimpan sebuah distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Sebuah model regresi dapat dikatakan baik jika model tersebut mempunyai sebuah distribusi yang normal atau mendekati normal. Karena nilai Asym. Sig (2-tailed) sebesar 0.081 > 0.05, maka keputusan terima H_0 dengan kesimpulan bahwa data telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas biasanya dipergunakan untuk mengidentifikasi adanya sebuah kolerasi yang signifikan antara variabel independent satu dengan variabel lainnya. Jika hasil dari nilai tolerance semua variabel lebih besar dari 0,10 dan hasil dari VIF < 10 dapat dilihat bahwa model regresi tidak ada kolerasi atau tidak ada multikolinearitas yang terjadi antara variabel dependen dan

sudah mencukupi asumsi uji multikolinearitas. Berikut hasil uji multikolinearitas yang sudah dilakukan

Berdasarkan nilai Tolerance, Karena nilai Tolerance pada semua variabel $X > 0,10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Sedangkan, berdasarkan nilai VIF karena nilai VIF dari semua variabel $X < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi

Uji Heteroskedastisitas

Dengan uji heteroskedastisitas kita bisa melihat apakah didalam suatu regresi akan terjadi suatu perbedaan varians residual melalui penelitian yang satu dengan penelitiannya lainnya. Dibawah ini adalah hasil uji heteroskedastisitas yang sudah dilakukan. Karena nilai signifikansi dari semua variabel $X < 0,05$, maka keputusan tolak H_0 dengan kesimpulan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada seluruh variabel X. Maka dari itu akan dilakukan tranformasi akar kuadrat terhadap data.

Regresi Linear Berganda

Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda kita bisa melihat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Berikut hasil analisis regresi linear berganda yang sudah dilakukan :

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	4,583	2,041
PerencanaanAnggaran	,068	,066
PelaksanaanAnggaran	,273	,087
PertanggungjawabanAnggaran	-,050	,130
EvaluasiKinerja	,774	,098

Dari tabel diatas menghasilkan model regresi sebagai berikut.

$$Y=4,583+0,068(X_1)+0,273(X_2)-0,050(X_3)+0,774(X_4) \dots\dots\dots (1)$$

Persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Konstanta 4,583; artinya jika variabel X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 bernilai 0 atau konstan maka akuntabilitas kinerja (Y) sebesar 4,583. Koefisien regresi variabel Perencanaan anggaran sebesar 0,068; artinya jika variabel bebas lain bernilai tetap dan perencanaan anggranan mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka akan menambag akuntabilitas kinerja sebesar 0,068. Koefisien regresi variabel Pelaksanaan Anggaran (X_2) sebesar 0,273; artinya jika variabel bebas lain bernilai tetap dan X_2 mengalami kenaikan satu satuan maka akan menambah akuntabilitas kinerja sebesar 0,273. Koefisien regresi variabel Pertanggung Jawaban Anggaran (X_3) sebesar -0,050; artinya jika varriabel bebas lain bernilai tetap dan variabel X_3 mengalami kenaikan satu satuan maka akan mengurangi

akuntabilitas kinerja sebesar 0,05. Koefisien regresi variabel Evaluasi Kinerja (X4) sebesar 0,774; artinya jika variabel bebas lain bernilai tetap dan variabel X4 mengalami kenaikan satu satuan maka akan menambah akuntabilitas kinerja sebesar 0,774.

Uji F Simultan

Uji F simultan digunakan untuk memperlihatkan bagaimana variable independent memiliki pengaruh besar kepada variabel dependen. Uji F digunakan untuk menganalisa kelayakan dari sebuah model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5% (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi (Ghozali, 2016) yaitu sebagai berikut (1) Jika nilai signifikan uji F > 0,05 maka, model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan dalam analisis berikutnya; (2) Jika nilai signifikan uji F < 0,05 maka, model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan dalam analisis berikutnya.

Sebelum menentukan besaran koefisien determinasi, kita terlebih dahulu memastikan apakah variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel respon. Dari tabel hasil Anova diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dalam uji F adalah sebesar 0,0001. Karena nilai sig ($0,0001 < 0,05$), maka keputusan Tolak H_0 sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji F dapat disimpulkan bahwa variabel X1, variabel X2, variabel X3 dan variabel X4 berpengaruh secara simultan terhadap variabel respon (Y).

Koefisien Determinasi

Dengan menggunakan uji koefisien determinasi kita bisa melihat bagaimana pengaruh yang diberikan oleh variabel independent kepada variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi yang sudah dilakukan. Dapat diketahui nilai R-Square sebesar 0,62 atau 62%. Besarnya angka koefisien determinasi (R-Square) sebesar 62% mengandung arti bahwa variabel Perencanaan Anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2) Pertanggungjawaban Anggaran (X3) dan Evaluasi Kinerja (X4) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) sebesar 62% sedangkan sisanya sebesar 38% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti

Uji Parsial (uji T)

Model	t	Sig.
1 (Constant)	2,245	,026
Perencanaan Anggaran	1,042	,299
Pelaksanaan Anggaran	3,132	,002
Pertanggungjawaban Anggaran	-,388	,699
Evaluasi Kinerja	7,934	,000

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil signifikansi uji T pada variabel Perencanaan Anggaran (X_1) sebesar 0,299. Karena nilai $0,299 > 0,05$ sehingga keputusan Terima H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel respon (Y). Dari tabel dapat diketahui hasil signifikansi uji T pada variabel Pelaksanaan Anggaran (X_2) sebesar 0,002. Karena nilai $0,002 < 0,05$ sehingga keputusan Tolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 berpengaruh secara parsial terhadap variabel respon (Y).

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil signifikansi uji T pada variabel Pertanggungjawaban Anggaran (X_3) sebesar 0,699. Karena nilai $0,699 > 0,05$ sehingga keputusan Terima H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel respon (Y).

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil signifikansi uji T pada variabel Evaluasi Kinerja (X_4) sebesar 0,0001. Karena nilai $0,0001 < 0,05$ sehingga keputusan Tolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 berpengaruh secara parsial terhadap variabel respon (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil dari penelitian ini uji hipotesis menyatakan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Perencanaan anggaran memiliki nilai t hitung sebesar 0,159 dengan nilai sebesar 0,299 yang lebih besar dari tingkat signifikan sebesar 0,299 yang lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 atau sebesar 5% maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H_1 diterima, dapat dinyatakan bahwa hasil jawaban dari responden menyatakan perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Dapat diartikan bahwa peran perencanaan anggaran belum dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketika perencanaan anggaran yang kurang efektif dan efisien dapat memberikan dampak yang buruk terhadap kinerja pemerintah, sehingga didalam aspek perencanaan anggaran harus dilakukan beberapa tindak lanjut yang lebih dalam untuk menetapkan standar standar yang lebih tepat untuk mengoptimalkan tercapainya sasaran kinerja dari setiap OPD terutama dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H_0 ditolak, dapat dinyatakan bahwa hasil jawaban dari responden menyatakan pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ginanjar et al., 2019) dan (Septiyan et al., 2021)

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil dari penelitian ini uji hipotesis menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan anggaran memiliki nilai t hitung sebesar 0,159 dengan nilai sebesar 0,002 yang lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0,002 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 atau sebesar 5% maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H2 ditolak, dapat dinyatakan bahwa hasil jawaban dari responden menyatakan pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. dalam hal implementasi anggaran yang dilakukan semakin baik, maka semakin besar juga tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan implementasi anggaran dan sasaran yang baik dan jelas dikarenakan implementasi merupakan dasar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan anggaran dari setiap OPD tersebut. Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sya'Roni & Widyawati, 2019), (Fathia et al., 2017), (Anggraeni & Saleh, 2020) dan (Wibisono & Riharjo, 2016)

Pengaruh Pertanggung Jawaban Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil dari penelitian ini uji hipotesis menyatakan bahwa pertanggung jawaban anggaran tidak berpengaruh signifikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Perencanaan anggaran memiliki nilai t hitung sebesar 0,159 dengan nilai sebesar 0,699 yang lebih besar dari tingkat signifikan sebesar 0,699 yang lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 atau sebesar 5% maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H3 diterima, dapat dinyatakan bahwa hasil jawaban dari responden menyatakan pertanggung jawaban anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal pertanggung jawaban anggaran yang dilakukan semakin meningkat, maka dari itu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak hubungan akuntabilitas yang akan mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan anggaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pertanggung jawaban anggaran dari setiap OPD tersebut. Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ilayuniga & Rahayu, 2019)

Pengaruh Evaluasi Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil dari penelitian ini uji hipotesis menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan anggaran memiliki nilai t hitung sebesar 0,159 dengan nilai sebesar 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 atau sebesar 5% maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H4 ditolak, dapat dinyatakan bahwa hasil jawaban dari responden menyatakan evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam evaluasi kinerja yang untuk OPD yang bersangkutan dapat mengetahui pencapaian realisasi anggaran dan rencana kerja yang telah ditetapkan, kemajuan dan kendala dalam setiap kinerja yang dilaksanakan dan beberapa sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian rencana kerja yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dari setiap OPD tersebut dapat meningkatkan kinerjanya yang lebih baik dimasa yang akan datang. Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prastianingrum et al., 2019)(Septiyan et al., 2021) dan (Abdallah & Carolina, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada seluruh OPD Kabupaten Pamekasan, dengan proksi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban anggaran, evaluasi kinerja maka peneliti dapat menyimpulkan perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja seluruh OPD Kabupaten Pamekasan, H₁ diterima. Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja seluruh OPD Kabupaten Pamekasan, H₁ ditolak. Pertanggung Jawaban anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja seluruh OPD Kabupaten Pamekasan, H₃ diterima. Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja seluruh OPD Kabupaten Pamekasan, H₁ ditolak

SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka dari itu peneliti memberikan saran sebagai berikut pertama, bagi peneliti selanjutnya sangat diharapkan untuk menggunakan beberapa metode lainnya untuk dapat memperoleh data secara lengkap dan jelas dengan hasil yang berbeda, dalam penyebaran kuesioner bisa langsung untuk melakukan wawancara sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya agar dapat mempertimbangkan faktor faktor yang lebih mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam sistem pelaporan

anggaran, realisasi anggaran, ketetapan sasaran anggaran, dan pengendalian standart akuntansi pemerintahannya. Dalam hal pembahasan perencanaan anggaran dan pelaporan anggaran alangkah lebih baiknya seluruh OPD Kabupaten Pamekasan lebih teliti dan memperhatikan program atau kegiatan yang direncanakan dan untuk pelaporan pertanggung jawaban perlu dilakukan pelaporan anggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Z., & Carolina, C. (2019). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah. *JURNAL EKONOMI SAKTI (JES)*, 7(1), 34–40.
- Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 36–44.
- Candra, V., Simarmata, N. I. P., Mahyuddin, M., Purba, B., Purba, S., Chaerul, M., Hasibuan, A., Siregar, T., Sisca, S., & Karwanto, K. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Fathia, N., Yusralaini, Y., & Anggraini, L. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)(Study Kasus Skpd Di Prov. Riau University*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Cetakan VIII, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginangjar, D., Pasolo, F., Siahaya, A., & Saleh, K. (2019). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Polda Papua). *The Journal of Business and Management Research*, 2(2), 224–232.
- Illayuniga, R., & Rahayu, Y. (2019). PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH OPD SURABAYA. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Indra, B. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Prastianingrum, K., Sudarmanto, E., Ilmiyono, A. F., & Nurdialy, M. (2019). PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BOGOR PERIODE 2014-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 1(1).
- Septiyan, R., Sudarmanto, E., & Octavianty, E. (2021). PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN BOGOR). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(3).
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225.
- Sya'Roni, M., & Widyawati, D. (2019). PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8).
- Wibisono, S., & Riharjo, I. B. (2016). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(9).